



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai pengaruh *self assessment sytem* dan pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Madya Batam dengan *free trade zone* sebagai variabel moderating, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan, sebagian besar wajib pajak di KPP Madya Batam sudah memiliki pemahaman baik mengenai *Self Assessment System* yang di dalamnya meliputi menghitung, menyetor atau membayar dan melaporkan pajak terutangnya.

Penilaian terhadap pemahaman wajib pajak di KPP Madya Batam meliputi menghitung, menyetor dan melaporkan PPh terutang juga menghitung dan melapor PPN terutang atas penyerahan barang keluar dari kawasan bebas.

Wajib pajak di KPP Madya memiliki pemahaman yang baik mengenai *Self Assessment System*, namun dalam hal pemahaman mengenai menghitung PPh final dan penghasilan bukan objek beserta pelaporan PPh final dan penghasilan bukan objek pajak harus ditingkatkan lagi. Wajib Pajak di KPP Madya Batam masih kurang pemahamannya dalam membedakan penghasilan yang termasuk PPh final dan penghasilan mana saja yang tidak termasuk objek pajak.

2. Secara keseluruhan wajib pajak di KPP Madya Batam memiliki pemahaman yang baik mengenai pemeriksaan perpajakan yang dalamnya meliputi

pemeriksaan dalam rangka kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan pemeriksaan dalam rangka tujuan lain.

Penilaian terhadap pemeriksaan perpajakan meliputi pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan baik dalam rangka kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun dalam rangka tujuan lain.

Wajib pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai pemeriksaan pajak, namun wajib pajak memiliki pemahaman lebih baik mengenai pemeriksaan dalam rangka tujuan lain daripada pemeriksaan dalam rangka kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, terutama dalam pemeriksaan kantor.

3. Secara keseluruhan, wajib pajak di KPP Madya Batam telah melaksanakan dengan baik kewajiban perpajakan yang berhubungan dengan *Free Trade Zone*. Penilaian tersebut dapat dilihat dari penilaian terhadap 4 dimensi berikut. (diurutkan dari tertinggi sampai terendah)

1. Dimensi *Comparison* (Perbandingan) : Mayoritas wajib pajak di KPP Madya Batam telah melaksanakan dengan benar cara perbandingan apabila terdapat perbedaan antara standar dalam kewajiban perpajakan yang berhubungan dengan *Free Trade Zone* dengan realita kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak KPP Madya Batam berhubungan dengan *Free Trade Zone*.

2. Dimensi *Actions* (Tindakan) : Mayoritas wajib pajak di KPP Madya Batam sudah merasa baik mengenai pengawasan yang dilakukan fiskus berhubungan dengan kewajiban perpajakan *Free Trade Zone* . namun wajib pajak di KPP Madya Batam mengharapkan fiskus memiliki daya tanggap

yang lebih cepat dari biasanya dalam melakukan pengawasan terhadap kewajiban perpajakan yang berhubungan dengan *Free Trade Zone*.

3. Dimensi *Standards* (Standar) : Mayoritas wajib pajak di KPP Madya Batam telah menjalankan kewajiban perpajakan berhubung dengan *Free Trade Zone* sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan mengandung prinsip *UNDP*.
4. Dimensi *Measurement* (Pengukuran) : Mayoritas wajib pajak di KPP Madya Batam sudah melaksanakan dengan baik cara pengukuran kewajiban perpajakan berhubung dengan *Free Trade Zone* . Namun cara pengukuran yang berkaitan dengan prinsip *effectiveness* dan *efficiency*, wajib pajak masih merasa kurang sehingga harus ditingkatkan lagi agar wajib pajak ke depannya akan merasa lebih mudah dan cepat dalam kewajiban perpajakan berhubung dengan *Free Trade Zone*.
4. Secara keseluruhan, wajib pajak di KPP Madya Batam memiliki tingkat kepatuhan yang tergolong tinggi baik dalam hal menghitung, membayar atau menyetor dan melaporkan pajak terutang , juga dalam hal pemeriksaan perpajakan dan dalam hal pengajuan fasilitas perpajakan di daerah *Free Trade Zone*..

Penilaian terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Madya Batam meliputi kepatuhan secara *enforce* dan *voluntary*, kepatuhan pemeriksaan dan kepatuhan dalam pengajuan fasilitas perpajakan di kawasan bebas atau *Free Trade Zone*.

Kepatuhan secara *voluntary* , kepatuhan pemeriksaan dan kepatuhan dalam pengajuan fasilitas perpajakan di daerah *Free Trade Zone* memiliki tingkat

kepatuhan yang lebih tinggi yang menandakan bahwa wajib pajak di KPP Madya Batam sudah sadar atas pentingnya pajak itu, juga mereka siap dan akan patuh bilamana dilakukan pemeriksaan dan sudah patuh mengikuti prosedur yang berlaku dalam pengajuan fasilitas perpajakan di kawasan bebas atau *Free Trade Zone*.

5. *Self Assessment System* dan Pemeriksaan yang dimoderasi oleh *Free Trade Zone* merupakan faktor yang dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Batam. Dalam hasil penelitian regresi moderating juga dihasilkan nilai positif yang berarti semakin baik pemahaman wajib pajak di KPP Madya Batam mengenai *Self Assessment* dan Pemeriksaan didukung dengan pelaksanaan *Free Trade Zone* yang baik akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Batam.

6.2 Saran

Sebagai masukan bagi KPP Madya Batam, peneliti memberikan beberapa saran sesuai dengan hasil penelitian guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan meningkatkan pemahaman mengenai *Self Assessment System* dan Pemeriksaan yang didukung dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan berhubungan dengan *Free Trade Zone*.

Saran-saran tersebut antara lain :

1. Pemahaman Wajib Pajak di KPP Madya Batam mengenai *Self Assessment System* tergolong baik, akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh KPP Madya Batam terutama untuk seksi Waskon agar pemahaman wajib pajak mengenai *Self Assessment* lebih baik :

- Memberikan pengarahan kepada wajib pajak mengenai *Self Assessment*, memberikan penjelasan lebih detail bahwa *Self Assessment* itu meliputi menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, terutama memberikan pengarahan lebih detail mengenai penghasilan yang dikenakan PPh final (PPh pasal 4 ayat 2) dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak (PPh pasal 4 ayat 3), Seksi waskon bisa memberikan daftar penghasilan yang dikategorikan sebagai PPh final dan penghasilan yang bukan termasuk objek pajak berdasarkan UU PPh, sehingga wajib pajak mendapatkan pedoman.
 - Mengadakan penyuluhan, sosialisasi maupun workshop untuk wajib pajak di KPP Madya Batam agar menumbuhkan keinginan mereka untuk ikut serta turun tangan dalam melakukan *Self Assessment*, dengan adanya keterbukaan dari KPP Madya Batam tentu akan menumbuhkan kepercayaan wajib pajak, memberikan gambaran mengenai integritas kantor pajak, sehingga dapat meningkatkan keikutsertaan wajib pajak sendiri dalam melakukan *Self Assessment*.
 - Dari sisi administrasi, KPP Madya Batam bisa menyederhanakan prosedur perpajakan yang sudah ada sehingga menjadi lebih sederhana atau lebih mudah dimengerti yang menyebabkan wajib pajak bisa dengan mudah melakukan kewajiban perpajakan tanpa merasa terbebani atau rumit.
2. Pemahaman wajib pajak di KPP Madya Batam mengenai pemeriksaan pajak termasuk baik, akan tetapi ada hal yang bisa dilakukan oleh KPP Madya Batam, yaitu

- KPP Madya Batam dapat memberikan sosialisasi berupa simulasi mengenai pemeriksaan pajak, dari proses awal pemeriksaan kantor sampai dengan dilakukan pemeriksaan lapangan, serta dalam simulasi tersebut diberikan pengarahan yang tepat kepada wajib pajak mengenai yang harus dipersiapkan, dilakukan pada saat dilakukan pemeriksaan.
 - KPP Madya Batam bisa menekankan lebih ke pemeriksaan lapangan, jadi apa yang akan terjadi jika wajib pajak dilakukan pemeriksaan lapangan, apa yang boleh fiskus lakukan, hak dan kewajiban wajib pajak apa sehubungan dengan pemeriksaan lapangan. Simulasi kemungkinan akan memberikan hasil yang lebih efektif daripada kata-kata, sehingga wajib pajak di KPP Madya Batam memiliki gambaran yang jelas mengenai pemeriksaan.
3. Wajib Pajak di KPP Batam sudah melaksanakan dengan baik kewajiban perpajakan yang berhubungan dengan *Free Trade Zone*. Namun ada hal yang harus diperhatikan oleh KPP Madya Batam terutama dalam hal meningkatkan keefektifan sehingga wajib pajak merasa efisien, dengan cara yaitu
- Membuat sistem berbasis online yang mengatur segala prosedur yang berkaitan dengan pengajuan fasilitas perpajakan di daerah *Free Trade Zone* sehingga dapat meningkatkan keefektifan kinerja KPP dalam pengawasan sehingga wajib pajak tidak membutuhkan waktu lama dalam pengajuannya sehingga efisien dapat terwujud
 - Membuat sistem pelaporan berbasis online yang menghubungkan sistem di perusahaan dengan di DJP sehingga semua transaksi dapat tercatat dengan jelas untuk menghindari adanya tindakan kecurangan yang salah satunya

berupa menaikkan maupun menurunkan nilai invoice yang tidak mencerminkan transaksi sebenarnya.

4. Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Batam sudah tergolong tinggi, tetapi masih dapat ditingkatkan menjadi sangat tinggi.

- Dalam hal pelaporan dan penyetoran atau pembayaran pajak secara *enforce*, KPP Madya Batam bisa memberikan edukasi kepada wajib pajak mengenai melapor dan menyetor pajak harus sesuai dan mengikuti aturan perpajakan.
- Dalam hal pelaporan dan penyetoran atau pembayaran pajak secara *voluntary*, KPP Madya Batam bisa memberikan pelayanan berupa menunjukan secara langsung kepada wajib pajak bahwa melapor dan membayar pajak tidak susah dan lebih baik lagi membayar dan melaporkannya sebelum batas akhir waktu sehingga tidak akan terburu-buru dan terhindar dari sanksi akibat adanya kesalahan maupun keterlambatan.
- KPP Madya Batam bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan penghargaan kepada wajib yang tergolong patuh yang dapat berupa piagam, sehingga wajib pajak di KPP Madya Batam bisa terpacu kemauan mereka sendiri untuk menjadi wajib pajak yang patuh.

5 Hasil Akhir secara keseluruhan, variabel *Self Assessment* dan Pemeriksaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Batam dengan *Free Trade Zone* sebagai variabel moderating termasuk dalam kategori Baik, namun akan lebih baik jika bisa tingkatkan menjadi sangat baik, maka oleh karena itu KPP Madya Batam harus menyediakan sistem informasi yang terpadu dengan

sumber daya manusia yang cukup dan memiliki pemahaman yang sangat baik untuk memberikan konsultasi agar wajib pajak memiliki pemahaman yang lebih baik terutama dalam hal *Self Assessment System*, Pemeriksaan Perpajakan dan juga pelaksanaan kewajiban perpajakan berhubungan dengan *Free Trade Zone*.



DAFTAR PUSTAKA

- Alm, James, Roy Bahl , Matthew N. Murray, 1990. Tax structure and Tax Compliance, *The Review of Economics and Statistics*, Vol 72 No 4 (Nove.,1990), PP 603-613
- Alm, Jackson, J. B. R. , M.Mckee. 1992. Estimating the Determination of Tax payers Compliance with Experimental Data, *National Tax Journal*, 45 (March), 107-114
- Alm, James. 1991. A perspective on the experimental Analysis of Taxpayer Reporting, *The Accounting Review*, Vol 66 No.03 . (July), pp, 577-593
- Andreoni, James , Brian Erald , Jonathan Feinstein. 1998. Tax Compliance, *Journal of Economic Literature*, Vol 36, No.2., pp 818-860
- Arman Imran. 2017. *Upaya Peningkatan Kepatuhan WP PMA di Pulau Batam*. Retrieved 22 September 2017 from <http://www.pajak.go.id/content/article/upaya-peningkatan-kepatuhan-wp-pma-di-pulau-batam>
- B.Ilyas,W , R. Burton. 2013. *Hukum Pajak. (edisi revisi)*. Jakarta: Salemba Empat
- BAPPENAS. 2007. *Modul Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan Yang Baik.
- Batrancea, Larissa Margareta, Ramona Anca Nichita , Loan Batrancea. (2012). Understanding The Determinants of Tax Compliance Behavior As A Prerequisite For Increasing Public Levies. *The USV Annals of Economics and Public Administration*, Vol 12 Iss : 1(15), pp.201- 208
- Batam Targetkan Penerimaan Pajak Rp 5,765 Triliun*. (2017). Retrieved 22 September 2017 from <http://batamekbiz.com/batam-targetkan-penerimaan-pajak-rp5675-triliun/>.
- BatamPos. 2015. *400 Ribu Warga Batam Nunggak Pajak*. Retrieved 22 September 2017 from <http://arsip.batampos.co.id/13-03-2015/400-ribu-warga-batam-nunggak-pajak/>
- Birskyte, Liucijia. 2013. Effects of Tax Auditing: Does the Deterrent Deter?. *Research Journal of Economics, Business and ICT*. Vol 8, No. 2. Pp 1-8
- Choong K. F. , M. L Lai. 2009. Self Asesment Taxes Sistem and Compliance Complexity: Tax Practitioner Perspektif. *Oxford Buisiness and Economics Conference Program*.

- Derdy SWD-WK. (2016). *ada ratusan wajib pajak kaya tidak lapor pajak di kepri dan riau*. Retrieved 22 September 2017 from <http://wartakepri.co.id/2016/05/13/ada-ratusan-wajib-pajak-kaya-tidak-lapor-pajak-di-kepri-dan-riau/>
- detikfinance. (2009). *Free Trade Zone how free con you go*. Retrieved 22 September 2017 from <https://finance.detik.com/pajak/d-1182328/free-trade-zone--how-free-can-you-go->.
- detikfinance.(2007).*Bea Masuk FTZ Hilang, Ditambal PPH*. Retrieved 30 Oktober 2017 from <http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-821195/bea-masuk-ftz-hilang-ditambal-pph>
- Direktorat Jendral Pajak : Lankin DJP 2016*. (2016). Retrieved 04 September 2017 from <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/LAKIN%20DJP%202016.pdf>.
- Direktorat Jendral Pajak. 2012. *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. Retrieved 21 Oktober 2017 from <http://www.pajak.go.id/content/strategi-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak.com>
- Direktorat Jendral Pajak. 2012.*Pemeriksaan Pajak*. Retrieved 19 Oktober 2017 from <http://www.pajak.go.id/content/pemeriksaan-pajak.com>
- Direktorat Jendral Pajak. 2012.*Petunjuk Pengisian SPT 1771*. Retrieved 17 Oktober 2017 from http://www.pajak.go.id/sites/default/files/formulir_pajak/Petunjuk%20Pengisian%20SPT%201771%20dan%201771-%24.pdf
- Eko Setiawan. 2017. *Heboh, Aturan Kirim Barang Keluar Batam!*. Retrieved from 18 September 2017 from <http://batam.tribunnews.com/2017/08/05/heboh-aturan-kirim-barang-keluar-batam>
- Enni Sri Hartati. (2017). *Mewujudkan Mimpi Batam*. Retrieved 18 September 2017 from <http://mediaindonesia.com/news/read/117487/mewujudkan-mimpi-batam/2017-08-14>
- Erly Suandy. 2011.*Perencanaan Perpajakan edisi 6*. Jakarta : Salemba Empat
- FATF.2010. *Money Laundering Vulnerabilities of Free Trade Zone*. FATF Report. pp 3-47
- Fiki Ariyanti . (2017). *DPR ketok palu APBN P 2017 seniilai Rp 2133 Triliun* . Retrieved 18 September 2017 from

<http://bisnis.liputan6.com/read/3037438/dpr-ketok-palu-apbn-perubahan-2017-senilai-rp-2133-triliun>

- Gambo, El-Maude Jibreel, Abdulasalam Mas'ud, Mustapha Nasidi, Oggini Simon Oyewole. (2014). Tax Complexity and Tax Compliance in African Self Assessment Environment. *International Journal of Management Research & Review*, Vol 4 Iss : 5, pp.575-582
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8*. Semarang : UNDIP
- Goolsbee, Austan. 2000. What Happens When You Tax The Rich ? Evidence From Executive Compensation, *The Journal of Political Economy*, vol 108, No. 2 (April), pp. 352-378
- Gusfahmi Arifin . (2016). *Perlunya Reformasi Perpajakan*. Retrieved 18 September 2017 from <http://www.pajak.go.id/content/article/perlunya-reformasi-pajak>.
- Hans Henricus B.(2008). *Bea Masuk dan Cukai Hilang, Pajak Andalannya*. Retrieved 31 Oktober 2017 from <http://ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=2096&q=&hlm=135>
- Hauptman, Lidija , Horvat Mirjana , Korez Vide Romana. 2014. Improving Tax Administration's Services as a Factor of Tax Compliance : The Case of Tax Audit. *Lex-Localis-Journal of Local Self-Government*. Vol 12, No. 3. pp. 481-501
- Herman Darwis, 2009. Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan. *Journal Finance and Banking*. Vol 13, No 3. pp 418-430
- Hestu Yoga Saksama. (2017). *Ditjen Pajak Rasio Kepatuhan rendah sense crisis harus dibangun*. Retrieved 18 September 2017 from (<http://www.pajak.go.id/content/news/ditjen-pajak-rasio-kepatuhan-rendah-sense-crisis-harus-dibangun>)
- Immanuel Nicholas Manafe.2015. *Jokowi Bicara FTZ Batam, Bintan dan Karimun*. Retrieved 12 November 2017 from <http://www.tribunnews.com/bisnis/2015/12/04/jokowi-bicara-ftz-batam-bintan-dan-karimu>
- Indonesia, K. K. (2016). *APBNP 2016*. Retrieved 18 September from <https://www.kemenkeu.go.id/APBNP2016>.
- Indonesia, R. (n.d.). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2009.

- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Meinarni Asmawi. 2013. The Impact Of Audit Rate, Perceived Probability Of Audit On Tax Compliance Decision (A Laboratory Experiment Study). *Journal of Indonesian Economy and Business*. Volume 28, Number 2, 2013, 286 – 301
- M. Zain. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat
- Mohammad Zakir Hosain. 2016. Free Trade Zones in Oman : A Descriptive Analysis. *Journal of Applied Management Science*. Vol 1 Iss 9 pp 65-74
- Muhammad Rifai. 2011. *Ini Dia 4 Daerah di Indonesia yang Bebas Pajak*. Retrieved 31 Oktober 2017 from <https://economy.okezone.com/read/2011/03/11/20/433881/ini-dia-4-daerah-di-indonesia-yang-bebas-pajak>
- Nabil Md.Dabour. 1999. Free Trade Zones in the Aftermath of The Uruguay Round : Experience of Selected OIC Member Countries. *Journal of Economic Cooperation*. Volume 20, Number 2, 1999, pp1-33
- OECD Committee of Fiscal Affairs Forum on Strategic Management. 2001. Compliance Measurement – Practice Note. OECD. 10 May 2001
- Oyok Abuyamin. (2015). *Perpajakan*. Bandung: Mega Rancage Press
- Oyok Abuyamin. (2011). *Seratus Empat Belas Kewajiban Wajib Pajak*. Bandung: Abbas z & Sumarni Publishing
- Oyok Abuyamin. (2011). *Seratus Sebelas Hak Wajib Pajak*. Bandung: Abbas z & Sumarni Publishing
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2008 Tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
- Kim Ga Yeong. 2014. *Pengaruh Self Assessment dan Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Bandung*. Bandung : UNPAR
- Kirchler, Erich, Ingrid Wahl, Erik Hoelzl .(2008). Enforced versus Voluntary Tax Compliance : " The Slippery Slope " Framework. *Journal Economics Psychology*. 29 (2) : 210-225
- Pemeriksaan Pajak*. (2012). Retrieved 18 September from <http://www.pajak.go.id/content/pemeriksaan-pajak> .

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-06/PJ/2016 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 Tentang Bentuk dan Format Formulir Surat Setoran Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/ 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri keuangan nomor 17/PMK 03/ 2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 239/PMK.03/ 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri keuangan nomor 18/PMK 03/ 2013, mengenai Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.03/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dan Pemasukan Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Angka Pengenal Importir
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 45/M-DAG/PER/7/2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23/M-DAG/PER/3/2009 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Di Bidang Perdagangan Luar Negeri Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan, Dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas

- Pouneh Rafie Asa, Mohabat Jahed. 2012. Factors in Free Trade - Industrial. *Singaporean Journal of Business Economics and Management Studies*. Vol 1, No 5, pp 51-56
- Rasagam, Ganesh, Douglas Zhihua Zeng. 2014. *Free Trade Zone - Learning From Global Experiences*. AFDC "FTZ Seminar". Shanghai
- Ray, Sommerfeld, Anderson Herschel M,dan Brock Horace R. dalam M. Zain. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins, Stephen P., Coulter Mary. 2005. *Management*. International Edition. New Jersey : Pearson Prentice Hall.
- Saipei, Noor Sharoja , Kasipillai, Jeyapalan. 2013. Impacts of The Self Assessment System for Corporate Taxpayers. *American Journal of Economics*, Volume 3 No 2. Pp : 75-81
- Sarker, Tapan K. 2003. Improving Tax Compliance in Developing Countries via Self-Assessment Systems - What Could Bangladesh Learn from Japan?. *Asia Pacific Tax Bulletin*, Vol 9, No 6 (June 2003), pp : 1-2
- Sekaran, Uma, Roger Bougie. 2016. *Research Methods for Business : A Skill Building Approach Seventh Edition*. UK: Wiley
- Shelvi. 2014. *Implementasi Self Assessment dan Gizzeling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Bandung*. Bandung : UNPAR
- Silalahi, Uber.2015.*Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Bandung, PT Refika Aditama
- Siti Kurnia Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Normal*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Siti Resmi. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 7 Buku 1*. Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*.Bandung: Alfabeta
- Suhardjito. (2013). *Reformasi Perpajakan Dalam Rangka Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Tata Kelola yang Baik Serta Kemandirian Bangsa: Lembaran Publikasi Ilmiah Pusdiklat Migas*. Vol 13, No. 3, Hal 30-39
- Suryohadi Djulianto. (2015). *Tata Cara Pelaksanaan Perpajakan (Edisi2)*. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka
- Teifenbrun, Susan (2015) "U.S. Foreign Trade Zones and Chinese Free Trade Zones: A Comparative Analysis," *Journal of International Business and Law*: Vol. 14: Iss. 2, Article 2.

- Terrefe, Mulugeta. 2016. A Close Scrutiny of Self Assessment System and its impact on the Tax Compliance Level of Tax Payers : The Case of Wolaita Zone. *American Scientific Research Journal for Engineering, Technology and Sciences (ASERJETS)*. Vol 20, No 1. pp. 78-103
- Tim Redaksi Ortax. 2015. *Tujuan, Jenis dan Jangka Waktu Pemeriksaan*. Retrieved 19 Oktober 2017 from <http://ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=108>
- Triajie Wahyu El Haq. 2017. *Target Pajak Naik 30% Begini Strategi KPP Batam*. Retrieved 22 September 2017 from <http://news.ddtc.co.id/artikel/9737/target-penerimaan-pajak-target-pajak-naik-30-begini-strategi-kpp-batam/>
- Wang Poh Kam, Ng Kwan Kee. 2009. *Batam, Bintan dan Karimun – Past History and Current Development Towards Being A SEZ*. *Lee Kuan Yew School of Public Policy*
- Wong Nam, Chang, Doina Maria Radulescu. 2004. Do Corporate Tax Concessions Really Matter for the Success of Free Economic Zones. *Economics of Planning*. 37:99-123
- UUD 1945. Retrieved 8 Oktober from <http://idih.pom.go.id/uud1945.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
- UNDP .1997a. *Governance for sustainable human development*. A UNDP Policy Document, New York: United Nations Development Programme